PERANAN NINIK MAMAK DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI LOKAL DI KENAGARIAN TIKU SELATAN KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

AGUS RYADI

NIM/TM : 1386093/2013

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2017

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: **Peranan Ninikmamak Dalam Membangun Demokrasi Lokal di Kenagarian Tiku Selatan Kabupaten Agam**
Nama	: Agus Ryadi
Nim/TM	: 1306093/2013
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 26 Juli 2017

Disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Suryanef, M.Si	**Dr. Akmal, SH., M.Si**
NIP. 19640606 199103 1 006	**NIP.19620704 198803 1 003**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Rabu Tanggal 26 Juli 2017 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Peranan Ninikmamak Dalam Membangun Demokrasi Lokal di Kenagarian Tiku Selatan Kabupaten Agam

Nama	: Agus Ryadi
Nim/TM	: 1306093/2013
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 26 Juli 2017

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Suryanef, M.Si	
Sekretaris	: Dr. Akmal, SH., M.Si	
Anggota	: Dr. Fatmariza, M.Hum	
Anggota	: Dr. Hasrul, M.Si	
Anggota	: Alia Azmi, S.IP., M.Si	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Ryadi

NIM/TM : 1306093/2013

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Peranan Ninikmamak Dalam Membangun Demokrasi Lokal di Kenagarian Tiku Selatan Kabupaten Agam**" adalah benar merupakan asli karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia di proses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. baik di instansi UNP maupun masyarakat dan negara.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 26 Juli 2017

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000 ENAM RIBU RUPIAH

AGUS RYADI

1306093/2013

ABSTRAK

Agus Ryadi : Peranan Ninikmamak Dalam Membangun Demokrasi Lokal di Kenagarian Tiku Selatan Kabupaten Agam

Nagari Tiku Selatan mempunyai 28 orang Ninikmamak. secara historis susunan eksekutifnya disebut dengan *Basa Nan Barampek* yakni (Datuak Rangkayo Basa, Datuak Rangkayo Bungsu, Rangkayo Kaciak, Datuak Rajo Dilia). *Basa Nan Barampek* memiliki kekuasaan penuh dalam nagari baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik. Namun pasca Reformasi Ninikmamak disetarakan dengan anak kamanakan dalam ruang politik. Kekuasaan dalam nagari lebih dominan dipegang oleh Wali Nagari dan perangkatnya, sehingga Ninikmamak hanya sebagai mitra Wali Nagari dalam pelaksanaan pemerintahannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purpossive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data dan triangulasi sumber. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan cara reduksi data, *display* data dan mengambil kesimpulan kemudian diverifikasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya pergeseran peran Ninikmamak dalam nagari Tiku Selatan. Hal ini disebabkan oleh regulasi pemerintah daerah yang mengkooptasi sistem pemerintahan nagari, rendahnya kualitas pendidikan formal Ninikmamak dan pengaruh demokrasi modern berimplikasi pada eksistensi kepemimpinannya dalam nagari. Ninikmamak di nagari Tiku Selatan saat ini dominan mempunyai kekuasaan adat dalam kaumnya. Tentu perlu upaya-upaya bagi Ninikmamak untuk mengembalikan peranannya seperti revitalisasi nilai-nilai adat yang telah memudar, meningkatkan wawasan ninikmamak dan sosialisasi pada masyarakat tentang peran ninik mamak dalam nagari.

ABSTRACT

Riyadi, Agus : The Character of Ninikmamak to build local democracy in South Tiku area Agam regency

South Tiku area has 28 niniak mamak. Historically the executive formation is called Basa Nan Barampek: Datuak Rangkayo Basa, Datuak Rangkayo Bungsu, Rangkayo Kaciak, Datuak Rajo Dilia. Basa Nan Barampek has an authorization in economy, social nor politic aspects. Eventough pasca reformasi, niniak mamak is equaled to anak kamanakan in politic aspect. Authorization in that area dominant hold by wali nagari and rows, with the result that niniak mamak is only as a partner wali nagari in implementation on that government.

This research used qualitative descriptive method. The informant is determined by using purposive sampling technique. The data are primer and secondary that collected by interview and documentation study. The validity of the data used by reduction data technique, presentation data and triangulation source. The data was analyzed by reduction data, display data and take a conclusion and then verification.

The result showed that there was mutation of the character niniak mamak in democracy arrangement in south tiku area caused by the regulation of the local government that "mengkooptasi" local government system, low of formal education quality of niniak mamak that implicate to the existence of leadership in that area. Nowadays, Niniak mamak in south tiku has a dominance authorization custom in their clan. It needs efforts of Niniak mamak to deport its characters such as revitalization of custom value that fade away, increase the knowledge of niniak mamak itself and do socialitation to the society about the character of niniak mamak in that area.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Syalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada figur panutan umat manusia Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul "**Peranan Ninikmamak Dalam Memebangun Demokrasi Lokal di kenagarian Tiku Selatan Kabupaten Agam,** disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Strata Satu (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Suryanef, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, koreksi dan petunjuk yang sangat beharga bagi penulis.
2. Bapak Dr. Akmal, SH., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan hingga selesainya penyusunan Skripsi ini.

3. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum, Bapak Dr. Hasrul, M.Si, Ibu Alia Azmi, S.IP., M.Si sebagai tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Akmal, SH., M.Si sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan pengarahan kepada penulis.
5. Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP yang telah memberi bantuan, dorongan, petunjuk dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dekan FIS UNP yang memberikan izin penelitian dan kemudahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar karyawan-karyawati Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam urusan perkuliahan dan pengurusan surat penelitian.
8. Bapak Wali Nagari Tiku Selatan beserta karyawan-karyawati yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
9. Seluruh informan dalam penelitian ini (Bapak A. Dt. Rangkayo Basa, Bapak A. Dt. St. Palindih, Bapak L,Dt. Bandaro Kayo, Bapak B,Dt. Panghulu Hakim, Bapak P. Dt. Rangkayo Kaciak, Bapak I. Dt. Tumangguang, Bapak Ir.Armansyah,Dt. Rajo Dilia, Bapak Bgd. Karman, Bapak Mahyuzar, Bapak N. Dt. Bgd Kali, Bapak D. Dt, Rangkayo bungsu, Bapak Bgd. Rosman, Ibu Idrawati,S.Pd)

10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda St. Khaimal Syam dan Ibunda tercinta Yulda Rizola, buat kakak-kakak ku Adeki Putra dan Syafril Afdani,ST. Serta keluarga besar lainnya yang telah membantu dalam menyelesaikan proses perkuliahan ini dengan baik dan tepat waktu.

11. Keluarga Besar Civics 2013 dan rekan-rekan Cafe FIS, Mahasiswa PPLK SMP 4 Padang Panjang, rekan-rekan IMAPASBAR Komisariat UNP yang telah memberikan dukungan, kritikan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

12. Khusus pada sahabat seperjuang saya Herman, Fajri (botak), Baim, Wido, Hengki, Sarah, Nia, Ketek *jo tumik injak gas tu lai kawan, adiak-adiak banyak yang nio masuak UNP lai.haaa* Dan Juga pada kakanda Candra Kirana, S.Pd yang terus memberikan bimbingan kepada kami dalam menyelasikan studi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Padang, Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan masalah 9
E. Fokus Penelitian 9
F. Tujuan Penelitian 10
G. Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritis 11
1. Konsep Ninikmamak 11
2. Demokrasi 12
3. Kepemimpinan di Minangkabau 20
4. Nagari 23
5. Pemerintahan Nagari 23
B. Kerangka Koseptual 32

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 35
B. Lokasi Penelitian 36
C. Informan Penelitan 37
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data 38

E. Uji Keabsahan Data 42
F. Teknik Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum Penelitian 45
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
a. Letak Geografis 45
b. Kependudukan 45
c. Agama 47
d. Jumlah suku dan penghulu……..47
e. Tingkat pendidikan dan perekonomian ninikmamak……..49
f. Struktur Pemerintahan Nagari Tiku Selatan 52
B. Temuan Khusus 58
1. Peranan Ninikmamak dalam Membangun Demokrasi Lokal .. 59
2. Bentuk Keterlibatan Ninikmamak dalam Nagari 64
3. Bentuk Pelaksanaan Demokrasi di Nagari Tiku Selatan 70
4. Faktor Penyebab Bergesernya Peran Ninikmamak dalam Membangun Demokrasi Lokal di Kenagarian Tiku Selatan.... 75
5. Upaya Ninikmamak untuk Mengembalikan Perannya dalam Membangun Demokrasi Lokal……..81
C. Pembahasan 87
1. Peranan Ninikmamak dalam Membangun Demokrasi Lokal 87
2. Faktor yang mempengaruhi pergeseran peran ninik mamak dalam membangun demokrasi lokal 95
3. Upaya Ninikmamak untuk Mengembalikan Perannya dalam Membangun Demokrasi Lokal……105

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 110
B. Saran 114
Daftar Pustaka 116
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian 38
Tabel 2 Jumlah Penduduk Nagari Tiku Selatan tahun 2017 46
Tabel 3 Mata Pencarian Masyarakat Tiku Selatan Tahun 2017.....46
Tabel 4 Jumlah Agama di Nagari tiku Selatan tahun 2017 47
Tabel 5 Jumlah sarana ibadah di nagari Tiku Selatan 47
Tabel 6 Jumlah Suku dan Datuak di nagari Tiku Selatan.....48
Tabel 7 Tingkat Pendidikan dan Perekonomian ninikmamak.....50
Tabel 8 Perbandingan sistem pemerintahan nagari dengan sistem pemerintahan desa 104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian 34
Gambar 2 Struktur Pemerintahan Nagari Tiku Selatan 53
Gambar 3 Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tiku Selatan.....55
Gambar 4 Struktur BAMUS Nagari Tiku Selatan.....57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari kantor Camat Tanjung Mutiara

Lampiran 3. Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian di nagari Tiku Selatan

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Adat bagi masyarakat Minangkabau merupakan roh kehidupan, sehingga berbagai upaya akan dilakukan masyarakat untuk tetap mempertahankan keberadaan adat itu sendiri. Tradisi masyarakat Minangkabau, demokrasi di institusionalisasikan melalui institusi *rapek* (rapat) sebuah dewan musyawarah mufakat untuk mencari, merumuskan dan menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Namun sebagai masyarakat yang dinamis, intervensi dan gempuran budaya tidaklah mungkin dihindari. Maka sangat di perlukan upaya untuk memposisikan adat seperti tetap pada esensinya yang membuat masyarakat Minangkabau tetap mampu mempertahankan adat itu sendiri ditengah derasnya arus perubahan dan intervensi budaya luar yang masuk kedalam kehidupan masyarakatnya.

Nagari yang disebut dengan republik mini mempunyai pemerintahan sendiri. Nagari pada dasarnya diperintahi oleh Kerapatan Adat Nagari yang anggotanya terdiri dari penghulu suku dan dan kepala kaum yang komposisi dan jumlahnya tergantung dengan adat masing-masing (Manan, Imran 1995). Susunan Kerapatan Adat tergantung kepada laras yang di pakai. Menurut adat *Koto-Piliang* kerapatan adat dipimpin oleh *penghulu pucuak*, yang memegang kekuasaan tertinggi yang kedudukannya tetap dan tidak bergilir. Sedangkan menurut adat *Bodi-Caniago* kerapatan adat dipimpin oleh salah satu dari

penghulu empat suku yang secara bergiliran menjadi ketua dari kerapatan adat. (Kemal, Iskandar. 2009:139-139).

Dalam masyarakat tradisional minangkabau, kepemimpinan ninik mamak merupakan salah satu unsur kepemimpinan “tungku tigo sajarangan” yang terdiri dari para ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai. Peran ninik mamak berkaitan dengan adat dan hubungan kedalam dan negosiasi keluar nagari. Sebelum masuknya Islam, niniak mamak merupakan pemimpin resmi masyarakat Minangkabau yang kuat dan berwibawa terutama sekali dalam nagari. Menurut Mochtar Naim (2004),

Selain ninikmamak pemerintahan nagari di Minangkabau juga tidak terlepas dengan kehadiran Bundo Kanduang. Dalam praktek kehidupan dia adalah perempuan yang disegani, dihormati, dan dimuliakan karena karismanya, kecerdasannya, dan kepiawaiannya mengelola dan memimpin semua orang yang tinggal dalam Rumah Gadang. Meski tidak memiliki kekuasaan secara formal, Bundo Kanduang tetap saja menjadi komponen yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Pada dasarnya, nagari disusun berdasarkan prinsip-prinsip sistem kekerabatan matrilineal dan teritorial. Sebagai unit pemerintahan terendah, nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat Nagari yang berfungsi sebagai badan eksekutif, legislatif dan yudikatif merunut *trias politica* Montesque. Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga mewakili kepentingan nagari terhadap nagari-nagari lainnya ataupun struktur kekuasaan lebih tinggi (Rafni dan Suryanef, 2005:353-354).

Sebelum adanya intervensi penjajahan Hindia Belanda nagari-nagari di Minangkabau berjalan dengan sistem pemerintahan tradisional yang mengacu pada kesatuan teritorial dan menurut garis keturunan (Pador, Zenwen. 2002:2). Dalam mengatur kehidupan bernagari, masyarakat mensinergikan antara nilai agama dan nilai adat *(syarak mangato adat mamakai), adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* (Alrafni,dkk.2008:24-25)

Kemudian dari itu, dengan di implementasikannya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 nagari dipecah-pecah menjadi desa-desa. Pada masa ini desa yang menjadi unit pemerintahan terendah. (Manan, Imran. 1995:89). Hal ini memberikan perubahan kedalam bentuk sistem pemerintahan nagari, nagari yang menjadi republik mini dan mengurusi rumah tangganya sendiri sekarang telah di seragamkan dengan pemerintahan terendah lainnya. Disini jelas bahwasanya nagari di jalankan sesuai dengan penyeragaman oleh pemerintah pusat.

Kendati demikian untuk mempertahankan eksistensi nagari di Minangkabau maka diterbitkan peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat No 13 tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Nagari mempunyai otonomi (kemandirian) dalam membangun organisasi kekuasaan dan pemerintahan sendiri, keleluasaan mengambil keputusan lokal, mengelola pemerintahan sehari-hari secara mandiri, mengelola sumberdaya lokal sendiri, mengelola interaksi sosial, mempunyai pola pengelolaan konflik dan sistem peradilan sendiri.

Berakhirnya era Orde Baru di tahun 1998 merupakan babak baru bagi perkembangan demokrasi lokal di Sumatera Barat. Kejatuhan masa Orde Baru telah membuka gerbang transisi bagi nagari untuk menuju sebuah konsep demokrasi. Hal ini di tandai dengan reorganisasi pemerintahan desa kedalam pemerintahan nagari melalui Perda No 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari kemudian diperbaharui dengan Perda No.2 tahun 2007, elit-elit Minangkabau kembali perhatian pada adat dan institusi yang merupakan bagian dari pemerintahan lokal, tetapi hanya sebatas pada semangat wawasan yang populis, nostalgia, dan berorenatasi pada masa kejayaan pemerintahan nagari sebelum kemerdekaan. Sayangnya, semangat nostalgia pemerintahan lokal di Sumatera Barat itu sendiri sangat bertolak belakang dengan identitas Minangkabau. Elit Minangkabau agak ambigu dalam memahami makna dari sebuah demokrasi lokal.(Tengku Rika Valentina,dkk.2009)

Dalam tradisi nagari di Minangkabau *ninik mamak* mempunyai peran dalam kehidupan politik nagari. Sekarang setelah kurang lebih 20 tahun di Sumatera Barat kehidupan bernagari menghilang dan baru dihidupkan lagi tahun 2000-an. Hal ini menarik untuk melihat bagaimana peran penghulu dalam nagari setelah kembali ke nagari. Terdapat perbedaan peran penghulu dalarn nagari sebelum tahun 1980-an dengan setelah kembali ke nagari sekarang ini. Disekitar tahun 1980-an sebelum nagari menjadi desa peran penghulu sangat besar dalam pemerintahan nagari.

Namun ada kekuatan dahsyat yang menghantam demokrasi lokal di Minangkabau pasca jatuhnya rezim Orde Baru yang menjalankan sistem demokrasi modern. Kini, setelah demokrasi digeser ke arah modern yang basisnya impor dari Eropa yang berlandaskan individualisme, sementara itu basis demokrasi Minangkabau ialah komunalitas - kebersamaan. Demokrasi di Minangkabau diteguhkan oleh eksistensi suku, dan kaum. Dalam bentuk ini, ninik mamak merupakan keniscayaan bagi berlangsungnya demokrasi. Ada kekuatan musyawarah dan mufakat yang lahir dari sistem demokrasi ini.

Kenyataannya, ninik mamak disetarakan dengan anak kamanakan dalam ruang politik. Maka tak ayal, ninik mamak tidak lagi memiliki legitimasi melainkan hanya sebatas simbol kultural yang tak bertaring lagi di dalam nagari. Maka tidak berlebihan jika dalam tradisi politik di Minangkabau, tidak pernah terdengar istilah pemilihan langsung. Berbeda dengan sudut pandang demokrasi modern yang mana partisipasi perseorang dalam menentukan kepemimpinan politik sangat mutlak adanya.

Implementasi sistem demokrasi langsung di nagari bahkan mendahului implementasi demokrasi langsung secara nasional pada Pilpres yang baru dimulai tahun 2004 maupun pilkada tahun 2005. Masalahnya kemudian, nilai musyawarah mufakat yang menjadi salah satu inti demokrasi perwakilan di Minang memudar secara signifikan.

Sekarang peran ninik mamak dalam nagari tidak sedominan pada masa sebelum tahun 1980-an. KAN tidak terlalu menentukan lagi dalam pemerintahan nagari, tugas KAN adalah mengurus masalah *sako dan pusako*

artinya mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan adat dan harta pusaka. Pemerintahan nagari dominan ditentukan oleh Wali Nagari dan perangkatnya.(Asrinaldi:2009),

Kemudian Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan peluang yang luas untuk melakukan proses transisi demokrasi di tingkat lokal. Transisi demokrasi lokal dalam wujud desentralisasi merupakan kebijakan negara yang dibutuhkan untuk mendukung otonomi nagari. ketika nagari berada dalam formasi negara. Prinsip dasar transisi demokrasi adalah pengakuan negara terhadap eksistensi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang kemudian diikuti dengan pembagian kekuasaan, kewenangan , sumberdaya dan tanggungjawab kepada nagari .

Nagari sebagai miniatur negara memiliki pembagian kekuasaan yang terdiri dari pemerintahan eksekutif dijalankan oleh Wali Nagari, pemerintahan legislatif dipegang oleh BAMUS, pemerintahan yudikatif dipegang oleh KAN. Ketiga lembaga yang mengisi pemerintahan nagari ini diharapkan mampu bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari. Namun dalam implementasinya, pemerintahan nagari lebih dominan ditentukan oleh Wali Nagari dan perangkatnya. Posisi ninik mamak sebagai pemegang kekuasaan yudikatif cenderung terabaikan dan bahkan penghulu tidak terlalu diperhitungkan.

Nagari Tiku Selatan merupakan salah satu nagari yang berada di kecamatan Tanjung Mutiara yang merupakan daerah pesisir pantai. Nagari

Tiku Selatan termasuk kepada bagian daerah Luhak Agam di Minangkabau. Secara historis pola adat masyarakat Tiku Selatan ialah sistem kelarasan *Koto-Piliang* yang digagaskan oleh datuak Katumangguangan yang menganut falsafah *titiak dari ateh* (Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo.2012:38). Hal ini menggambarkan bahwa besarnya peran penghulu dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari, dalam sistem kelarasan *Koto-Piliang* kedudukan ninik mamak tidaklah sama melainkan mempunyai tingkatan atau kedudukan sendiri, dalam tambo minangkabau disebutkan *bajanjang naiak batanggo turun* artinya ada hirarki dalam sistem ini, dan hirarki itu selalu ada dalam struktur pemerintahan. Terutama adanya batasan antara mamak dengan kamanakan dalam bidang sosial politik kemasyarakatan. (Julius Dt. Malako Nan Putiah.2004:155)

Nagari Tiku, memiliki susunan eksekutif yang disebut dengan Basa Nan Barampek yakni (*Datuak Rangkayo Basa, Datuak Rangkayo Bunsu, Datuak Rajo Dilia, Rangkayo Kaciak)* mereka ini dibantu oleh tiga Parik Paga sebagai penjaga sipadan, Mereka ini adalah *Pamuncak di Gasan Ketek, Pamuncak Bandaro di Bukit Malintang dan Rangkayo Mulie di Muaro Putuih* 7 panghulu andiko, Para datuk Andiko ini tak ada batasan jumlahnya, datuk Andiko inilah yang memimpin dan mengatur anak kemenakan yang berada di suku masing-masing. Gelar datuk yang mereka dapatkan adalah pemberian dari Basa nan Barampek atas permintaan dari kaumnya. Para penghulu kaum ini selalu diikutsertakan oleh Basa Nan Barampek dalam berbagai masalah adat. Inilah bukti system demokrasi adat nagari Tiku yang telah berjalan

ratusan tahun lamanya, yang *indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan*. Selain itu Basa Nan Barampek juga dibantu oleh satu Panghulu Hakim, imam dan khatib, labai nagari, penghulu bungo karang (orang yang memiliki jasa besar bagi anak kemanakan serta mengharumkan nama nagari). Para perangkat nagari ini sudah memiliki fungsi dan tugas masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulisnya dalam bentuk skripsi, dengan judul **Peranan Ninik Mamak Dalam Membangun Demokrasi Lokal di Kenagarian Tiku Selatan, Kabupaten Agam.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Intervensi dan gempuran budaya global yang mengancam eksistensi nilai-nilai budaya lokal minangkabau (induvialisme).
2. Setelah kurang lebih 20 tahun di Sumatera Barat kehidupan bernagari menghilang dan baru dihidupkan lagi pada awal tahun 2000-an.
3. Posisi penghulu sebagai pemegang kekuasaan yudikatif cenderung terabaikan dan bahkan penghulu tidak terlalu diperhitungkan.
4. Sistem pemerintahan nagari saat ini bertolak belakang dengan sistem pemerintahan nagari sebelum era Reformasi.

5. Adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengkooptasi pelaksanaan sistem pemerintahan nagari yang lebih dominan dibandingkan niniak mamak.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar tidak terjadi pengambangan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yaitu bagaimana peran ninik mamak dalam membangun demokrasi lokal dalam pemerintahan nagari di kenagarian Tiku Selatan kabupaten Agam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ninik mamak dalam membangun demokrasi lokal di kenagarian Tiku Selatan kabupaten Agam?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan bergesernya peran ninik mamak dalam membangun demokrasi lokal di kenagarian Tiku Selatan kabupaten Agam?
3. Bagaimana upaya ninik mamak dalam mengembalikan perannya dalam membangun demokrasi lokal di kenagarian Tiku Selatan kabupaten Agam?

E. Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini difokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi bergesernya peran ninik mamak dalam

membangun demokrasi lokal dalam pemerintahan nagari di kenagarian Tiku Selatan kabupaten Agam.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan ninik mamak dalam membangun demokrasi lokal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bergesernya peran ninik mamak dalam membangun demokrasi lokal.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari bergesernya peran ninik mamak dalam membangun demokrasi lokal.

G. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan peneltian ini, maka penelitian ini bermanfaat untuk antara lain :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada berbagai kalangan seperti kalangan akademisi khususnya pada tingkat perguruan tinggi dan umumnya pada masyarakat luas lainnya yang tertarik tentang pergeseran peran niniak mamak dalam membangun demokrasi lokal.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi kepada kebijakan yang diambil Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan sistem demokrasi bernagari.